

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak kebijakan Otonomi Daerah diberlakukan, terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta diperbaharui dengan Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Kebijakan otonomi daerah tersebut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah telah mencanangkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan yaitu lima tahun. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan, perlu didukung oleh aparatur pelaksana yang mampu dan terjalinnya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya, maka pemerintahan daerah harus memperhatikan pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat Desa, karena keberhasilan pembangunan pedesaan akan sangat ditentukan oleh terciptanya Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang baik.

Administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah, dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.

Administrasi pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Pengelolaan dan peningkatan serta pembangunan administrasi pemerintahan desa diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas-tugas administrasi yang dibebankan kepada pemerintahan desa. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki tugas untuk melaksanakan administrasi pemerintahan sebagai suatu komponen



penyelenggaraan Tugas-tugas pemerintah desa. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pembangunan masyarakat desa dan pada gilirannya dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa. Perangkat pemerintahan desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 84 tentang pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah desa yang yang pelaksana atau penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa adalah :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan
4. Badan Permusyawaratan Desa

Berhubung pemerintahan desa beserta perangkatnya menjadi penentu dan merupakan barisan terdepan dalam melaksanakan dan mensukseskan program pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa maka diharapkan perangkat desa tersebut memiliki kemampuan dan berperan aktif dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa, maka administrasi pemerintahan desa ini harus semakin meningkat agar pembangunan sistem administrasi pemerintahan desa semakin baik pula, khususnya dalam upaya mewujudkan desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Mengingat administrasi pemerintahan tersebut mempunyai arti yang sangat penting sebagai sumber data dan informasi mengenai masalah kependudukan dan masalah sosial ekonomi masyarakat desa, yang kemudian menjadi segala sumber data dan informasi pula bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional, maka penataan desa sudah selayaknya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



desa dan perangkat desa, serta kantor desa yang memadai sebagai tempat untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang mampu bagi pelayanan dalam administrasi pemerintahan desa. Desa Koto Cerenti dipimpin oleh Kepala Desa yaitu di bawah pimpinan Bapak Marwadi dan dibantu oleh Bapak Apri Yandi, sebagai Sekretaris Desa Koto Cerenti dalam menjalankan roda pemerintahan dan urusan administrasi pemerintahan. Selain itu juga, dibantu oleh beberapa kepala urusan seperti Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, dan Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Dusun hingga ketua RT dan RW. Namun demikian berdasarkan pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa kegiatan administrasi pemerintahan desa di desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi masih belum terlaksana sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor gejala yang terlihat sebagai berikut :

a. Buku Registerasi Desa Yang belum terisi secara lengkap

Berdasarkan prariset yang telah dilakukan pada 20 Februari 2016 di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui bahwa Pemerintahan Desa Koto Cerenti belum menyelesaikan tugasnya dalam melaksanakan tertib administrasi desa. Sebagai tugas dasar pemerintah, pemerintah Desa Koto Cerenti wajib untuk melaksanakan tugas administratif nya. Tugas administratif tersebut diaplikasikan dengan buku-buku administrasi desa yang mencakup bidang buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan desa, buku administrasi pembangunan dan administrasi lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kurangnya keterampilan dan Kemauan aparatur desa dalam pelaksanaan administrasi desa

Berdasarkan peninjauan langsung di lokasi penelitian terlihat bahwa belum terlaksana nya tertib administrasi di Desa Koto Cerenti karena aparatur desa tidak memperhatikan masalah administrasi desa.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang perangkat desa, didapati bahwa mereka juga belum terlalu paham mengenai tata cara pengisian buku register tersebut, banyak faktor yang dapat mempengaruhi aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya selaku aparatur desa bahwa aparatur desa kurang memiliki keterampilan dalam pelaksanaan komputerisasi dan pengisian buku-buku administrasi desa. Dengan minimnya keterampilan aparatur Desa Koto Cerenti maka buku-buku administrasi di Desa Koto Cerenti masih banyak yang tidak lengkap atau tidak terisi.

c. Sarana dan pra sarana penunjang proses administrasi seperti peralatan kantor, alat transportasi belum menunjang.

Berdasarkan Pengamatan yang dilakukan di kantor desa koto cerenti, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana Penunjang Proses Administrasi Pemerintahan Desa belum terlihat cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Sarana dan Pra Sarana Penunjang Proses Administrasi Pemerintahan Desa Koto Cerenti Tahun 2016

No	Jenis	Unit	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
1	Kendaraan Dinas	1	1	-
2	Komputer	2	1	1
3	Mesin TIK	3	1	2
4	Ruang Kerja	3	3	-
5	Meja Kerja	6	5	1
6	Kursi Kerja	18	10	8
7	Lemari Arsip	6	4	2
8	Papan Informasi	3	2	1
9	Ruang Tunggu	1	1	-
<b>Jumlah</b>		43	28	15

Sumber : Pra Survey di Desa Koto Cerenti Februari 2017

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sebagai alat penunjang proses pelaksanaan administrasi pemerintah Desa Koto Cerenti tergolong rendah dan kurang mendukung untuk pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa. Dari Tabel dapat dilihat bahwa ada beberapa sarana dan prasarana yang dalam kondisi kurang baik seperti komputer, Mesin Tik, Meja, Kursi, Lemari Arsip Dan Juga Papan Informasi. Oleh karena itu diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran proses pelaksanaan administrasi pemerintahan desa sehingga bisa menciptakan pelayanan yang baik.

Berangkat dari faktor gejala di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Administrasi



*Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri No 47 Tahun 2016 Di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”*

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa faktor gejala latar belakang diatas dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Permendagri No 47 tahun 2016 tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi
2. Faktor penghambat Implementasi Permendagri No 47 tahun 2016 tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Permendagri No 47 tahun 2016 tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk Mengetahui Faktor penghambat Implementasi Permendagri No 47 tahun 2016 tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintahan desa, khususnya pada Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dan Pemerintahan desa pada umumnya dalam menyelenggarakan pemerintahannya.
2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa agar efektif.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengetahuan serta pandangan dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan desa Koto Cerenti

#### 1.5. Sistematika Penulisan

##### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

##### **BAB II :Telaah Pustaka**

Pada bab ini akan dibahas telaah pustaka berisikan tentang Telaah Pustaka dan menyangkut Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini akan dibahas tentang Hal-hal yang berhubungan dengan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Serta Analisis Data.

**BAB IV : Gambaran Lokasi Penelitian**

Bab ini berisikan gambaran objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan di lakukannya penelitian, karakteristik dan demografi.

**BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian ini tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

**BAB VI : Penutup**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepan.